



ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI-RELIGI DI PANTAI NGOBARAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

POLICY NETWORK ANALYSIS IN DEVELOPMENT OF MARINE-RELIGIOUS TOURISM ON NGOBARAN BEACH, GUNUNGKIDUL DISTRICT

Jeryn Anggitasari¹, Marita Ahdiyana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 15-11-23

Diperbaiki 20-12-23

Disetujui 23-12-23

Kata Kunci:

Kebijakan Publik,
Jejaring Kebijakan,
Pengembangan Wisata

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan relasi aktor yang terbentuk akibat koalisi aktor dalam pengembangan wisata bahari-religi di Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul dan faktor pendukung dan faktor penghambat proses jejaring kebijakan dalam pengembangan wisata Pantai Ngobaran. Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bidang dan Staff Bidang Pemasaran dan Kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Kanigoro, Ketua Pokdarwis Sido Rukun, Pemangku Adat Pura Segara Wukir, serta pelaku usaha sekitar pantai. Teknik untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Aktor pemerintah dan masyarakat memiliki interaksi horizontal dengan posisi setara namun belum melibatkan swasta, media, LSM, dan akedemisi. (2) Sinergitas terbentuk belum optimal akibat minimnya kesadaran para aktor serta masih adanya ego sektoral aktor. (3) Tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dalam jejaring kebijakan belum seimbang. (4) Proses pertukaran sumber daya akibat dari relasi ketergantungan masih belum optimal. Sejalan dengan hasil penelitian ini, supaya pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran dapat berjalan optimal diperlukan upaya melibatkan elemen swasta, LSM, media, maupun akademisi dalam sirkulasi kebijakan dan didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.

ABSTRACT

Keywords:

Public Policy, Policy
Network, Tourism
Development

This research aims to identify the pattern of actor relationships formed as a result of actor coordination in the development of maritime-religious tourism at Ngobaran Beach, Gunungkidul Regency and the supporting and inhibiting factors in the network policy process in developing Ngobaran Beach tourism. The research design used is a qualitative research method with a descriptive approach. The research subjects were the Head of the Development Division of the Gunungkidul Regency Tourism Office, the Head of the Marketing and Cooperation Division of the Gunungkidul Regency Tourism Office, the Head of Kanigoro Village, the Chair of the Sido Rukun Pokdarwis, the Traditional Leaders of the Segara Wukir Temple, as well as business actors around the coast. Data collection techniques use interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques are carried out using data analysis techniques. The research results; (1) Government and community actors have horizontal interactions with equal positions but do not involve the private sector, media, NGOs and academics. (2) The synergy that is formed is not yet optimal due to the lack of awareness of the actors and the existence of actor sectoral egos. (3) The level of interest and influence of actors in network policy is not yet balanced. (4) The resource exchange process resulting from dependency relationships is still not optimal. In line with the results of this research, so that the development of marine-religious tourism at Ngobaran Beach can run optimally, efforts are needed that involve elements of the private sector, NGOs, media and academics in circulation policies and are supported by the availability of adequate resources.

1. Pendahuluan

Kemajuan pada bidang pariwisata menjadikan pengembangan pariwisata dianggap penting karena keberadaannya mampu memberikan kontribusi positif dalam penerimaan devisa negara, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyerapan tenaga kerja. Selain itu pemerintah juga menargetkan peningkatan bertahap penerimaan PDB Nasional dari sektor pariwisata dari 4,0% di tahun 2020 menjadi 4,5% di tahun 2024 [5]. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki daya saing pariwisata dengan pergerakan menuju ke arah yang positif. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Economy Forum, Indonesia menempati peringkat ke-32 atau naik 12 posisi dari 117 negara dengan score sebesar 4,4 atau naik 3,4% dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) [15]. Sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik, pada tahun 2022 Indonesia berhasil masuk ke dalam 10 besar dengan menduduki peringkat ke-8 [15].

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai kebijakan yang menunjang aktivitas pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisatanya dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025. Melalui peraturan tersebut Pantai Ngobaran termasuk ke dalam kawasan strategis I sebagai satu-satunya kawasan wisata pantai berbasis wisata bahari dan religi atau keagamaan. Pengembangan wisata bahari-religi di Pantai Ngobaran dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan pengembangan wisata bahari dan program pengembangan wisata religi.

Pengembangan wisata bahari Pantai Ngobaran terlihat dari kebijakan revitalisasi dan pembangunan fisik untuk mengembangkan kawasan wisata pantai dari segi fisik, penataan kawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Dalam pengembangan wisata Pantai Ngobaran pembangunan dan revitalisasi fisik sarana dan prasarana umum tidak dapat dijadikan barometer keberhasilan proses pengembangan wisata. Dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, pengembangan wisata Pantai Ngobaran masih mengalami kendala; (1) lemahnya daya saing Pantai Ngobaran dengan pantai lain di Kabupaten Gunungkidul, (2) belum ada investor yang masuk (3) barang dagangan non-makanan yang diperjual belikan di kawasan pantai merupakan pemasok dari masyarakat luar, sehingga nilai tambah produk dagangan non-makanan tidak sepenuhnya mengalir seluruhnya pada pelaku ekonomi masyarakat disekitar kawasan pantai, (4) menurunnya kualitas lingkungan akibat banyaknya pembangunan di kawasan pantai serta penumpukan sampah non-organik dari wisatawan yang merusak lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kawasan pantai dan mencemari tempat ibadah sakral, (5) pengembangan wisata religi belum diprioritaskan.

Sektor pariwisata merupakan industri multidimensi dan lintas sektoral atau bukan sektor yang dapat berdiri sendiri sehingga kebijakan pengembangannya bersifat multistakeholder atau kebijakan dengan keterlibatan banyak aktor. Aktor yang terlibat dalam kebijakan pengembangan wisata Pantai Ngobaran di Kabupaten Gunungkidul memiliki peran masing-masing. Unsur pemerintah diwakili oleh lembaga eksekutif dan legislatif terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki peran sebagai koordinator dan

tanggungjawab dalam proses sosialisasi, edukasi, implementasi, serta pengendalian dan pengawasan. Adapun unsur masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) kawasan pantai dan Kelompok Religi dan Budaya Pura Segara Wukir

Pengembangan wisata Pantai Ngobaran di Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi permasalahan dalam proses interaksi dan kerjasama antar aktor yang terlibat. Komunikasi antar aktor yang terlibat masih kurang baik, karena tidak adanya tim yang menjadi koordinator bagi para aktor untuk berkomunikasi secara langsung. Interaksi dan kerjasama yang kurang optimal ini pada akhirnya berpengaruh pada kurangnya aktivitas promosi dan pemasaran pada Pantai Ngobaran sehingga menyebabkan lemahnya daya saing Pantai Ngobaran dan berakibat pantai ini tidak banyak diketahui oleh wisatawan Selanjutnya, sistem pengawasan antar aktor juga masih kurang baik dikarenakan ego sektoral masing-masing aktor yang tinggi dan kurangnya akan kesadaran untuk saling mengawasi.

Penelitian terkait jejaring kebijakan menjadi penting karena berimplikasi pada proses pengembangan wisata Pantai Ngobaran di Kabupaten Gunungkidul. Jejaring kebijakan mampu menghubungkan pemerintah dengan aktor masyarakat untuk dapat menyatu dalam proses pengembangan wisata Pantai Ngobaran. Tercapainya pengembangan wisata di Pantai Ngobaran sangat ditentukan oleh konflik dan koalisi aktor jejaring kebijakan. Hubungan erat atau kekuatan jejaring yang terjalin di antara pemerintah dan aktor kepentingan lainnya dalam jejaring kebijakan inilah yang menentukan tercapai atau tidaknya proses pengembangan wisata bahari-religi di Pantai Ngobaran.

Penelitian terkait jejaring kebijakan sebelumnya telah banyak dilakukan. Pertama, penelitian oleh Kristianus Simon Hale Molan (2022) yang berfokus pada jejaring kebijakan dalam aktivitas pengambilan keputusan oleh para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata budaya di Desa Lewokluok. Kedua, penelitian oleh Dewi Gartika dan Muthya Diana (2020) yang berfokus pada jejaring kebijakan untuk mengetahui aktor yang terlibat dan perannya dalam pelaksanaan Program Ecovillage di Desa Mekarmukti. Ketiga, penelitian oleh Ine Mariane, Aswin Palls, Andre Areismansyah (2022) yang berfokus pada bentuk model jejaring kebijakan yang terjadi dalam aktivitas implementasi program kebijakan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tingkat keterlibatan aktor dan bagaimana mengelola relasi aktor serta sumber daya dalam pengembangan wisata pantai dengan menggunakan 4 (empat) indikator teori jejaring kebijakan Rhodes (2014), yaitu; (1) pemetaan dan pengelolaan relasi aktor, (2) interdependensi dan kerjasama melalui sinergitas aktor, (3) proses interaksi berkelanjutan dan pengelolaan sumberdaya, (4) tercapai kemanfaatan bersama. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses kerjasama, hubungan, dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata Pantai Ngobaran di Kabupaten Gunungkidul.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Wisata Bahari-Religi Di Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul” ini

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017) didefinisikan sebagai penelitian yang fokus untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alami atau yang terjadi akibat manusia yang mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya [13]. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Ngobaran yang berada di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa SKPD yang terkait pengembangan wisata Pantai Ngobaran. Beberapa SKPD tersebut antara lain Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Desa Kanigoro. Sedangkan waktu untuk pengambilan data, pengolahan data, dan penyajian data hingga menghasilkan laporan penelitian dilaksanakan mulai dari Mei 2023 s.d. Oktober 2023. Subjek penelitian merupakan atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan [13]. Hal tersebut membuat subjek dalam penelitian ini adalah aktor yang terlibat, saling bekerja sama dan saling berinteraksi dalam pengembangan wisata Pantai Ngobaran di Kabupaten Gunungkidul yakni pemerintah dan masyarakat terlembaga

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi atau mengamati langsung kondisi di lapangan terhadap Pantai Ngobaran. Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh melalui catatan hasil wawancara terhadap subjek penelitian mengenai jejaring kebijakan dalam pengembangan wisata Pantai Ngobaran. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2023. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan bantuan dari pedoman wawancara, pedoman observasi serta dokumentasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara menurut Sugiyono (2017) adalah metode untuk mengumpulkan data dengan pertemuan antara peneliti dan subjek penelitian untuk saling memberikan informasi atau pemikiran dengan memberikan pertanyaan dan jawaban [13]. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan yang sudah ditentukan menggunakan teknik purposive, observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mencatat informasi sebagaimana yang terlihat atau disaksikan selama penelitian [2]. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan di Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Desa Kanigoro dan wilayah Pantai Ngobaran, dan Menurut Sugiyono (2017) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang datanya dapat menghasilkan catatan penting sebagai sumber data [13]. Dokumentasi yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi atau kelompok komunitas terkait yang berhubungan dengan jejaring kebijakan dalam pengembangan wisata Pantai Ngobaran di Kabupaten Gunungkidul. Dokumen terkait penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Dalam menguji dan memastikan validitas data dapat dilakukan dengan lima strategi yaitu, triangulasi data, member checking, memperpanjang waktu observasi di lapangan, pemeriksaan oleh sesama peneliti, dan pola partisipatoris [2]. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teori untuk membandingkan hasil wawancara dengan informan. Triangulasi sumber juga diperkuat dengan hasil temuan berdasarkan data sekunder serta melakukan pencocokan antara hasil wawancara dengan observasi maupun dokumentasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk menjelaskan bagaimana jejaring kebijakan dalam upaya pengembangan wisata Pantai Ngobaran. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan mengatur urutan data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain [13]. Dalam penelitian ini, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan interaktif dan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pantai Ngobaran merupakan obyek wisata yang menawarkan pesona alam bahari yang indah dan bernuansa religi dengan keberadaan Pura Segara Wukir sebagai tempat beribadah umat Hindu. Pantai Ngobaran terletak di Padukuhan Gebang, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari. Objek wisata Pantai Ngobaran dikelola langsung oleh masyarakat Desa Kanigoro yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Sido Rukun yang terbentuk pada tahun 2012 dan telah memiliki 78 anggota. Kebijakan pengembangan wisata diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 yang menjadi acuan dasar pengembangan kawasan Ngobaran yang saat ini diklasifikasikan sebagai obyek wisata bahari dan religi.

Pengembangan wisata Pantai Ngobaran mengalami beberapa permasalahan yaitu rendahnya days saing dan manajemen pengelolaan obyek wisata yang kurang optimal. Sejak kawasan Ngobaran dijadikan tempat wisata manajemen pengelolaan pantai lebih terfokus untuk memperkenalkan kawasan pantai yang mendukung promosi keindahan alam bahari saja. Sedangkan aktivitas promosi wisata kereligiannya kurang optimal. Kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran merupakan kebijakan yang kompleks sehingga dalam prosesnya memerlukan keterlibatan banyak aktor atau lembaga sesuai dengan bidang yang terkait. Hal ini dijelaskan dalam Perda Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bahwa semua kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan wisata diluar kemampuan salah satu aktor maka akan ditangani oleh lembaga lain/SKPD yang membidangi.

Keberhasilan maupun kegagalan kebijakan dipengaruhi oleh peran aktor

sebagai pelaksana kebijakan. Dengan demikian berarti bahwa aktor yang terlibat harus membangun jaringan kerjasama agar dapat mencapai tujuan kebijakan. Identifikasi aktor merupakan sebuah upaya dalam mendeskripsikan tindakan aktor dan arena aktivitas aktor yang terdapat dalam sirkulasi kebijakan. Pentingnya identifikasi dilatarbelakangi oleh kepentingan yang beragam dan berpotensi membatasi atau mendukung kebijakan [1]. Beberapa aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul memiliki kepentingan, tugas, dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Pendekatan jejaring kebijakan digunakan untuk menjelaskan terkait bagaimana mengelola kepentingan aktor dalam jejaring serta bagaimana mengelola hubungan antar aktor, sehingga dapat terwujud tindakan yang sinergi dalam pelaksanaan pengembangan.

3.1. Pemetaan dan Pengelolaan Relasi Aktor

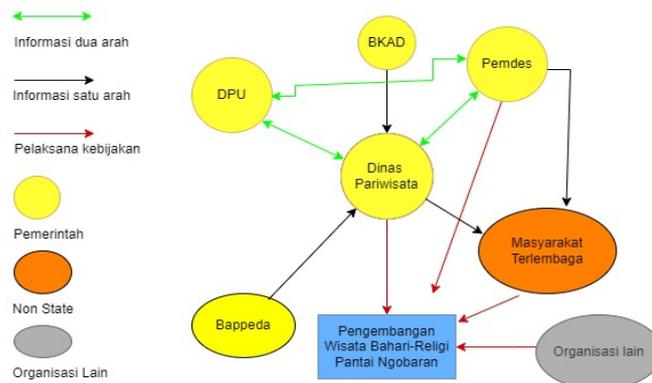
Secara teori, jejaring kebijakan didasarkan pada asumsi relasi para aktor yang saling ketergantungan dalam akses sumber daya dan melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama [3]. Pemetaan aktor dilakukan sejak awal pada saat perumusan atau perencanaan kebijakan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Gunungkidul No. 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata bahwa pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 1. Aktor dan Perannya Dalam Jejaring Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari-Religi di Pantai Ngobaran

No	Aktor	Peran	
1	Pemerintah	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	Penyedia regulasi dan kebijakan, menetapkan prioritas dan alokasi anggaran, koordinasi dan fasilitator pengembangan wisata, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan promotor potensi pariwisata bahari-religi serta pengawasan pengembangan pariwisata
		Bappeda Kabupaten Gunungkidul	Perencanaan kebijakan pengembangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, koordinasi
		Dinas Pekerjaan Umum BKAD Kabupaten Gunungkidul	Pemberdayaan dan fasilitasi pembangunan fisik dan pembangunan akses jalan
		Pemerintah Desa Kanigoro	Koordinasi stakeholder, penetapan prioritas dan alokasi anggaran, penyedia regulasi dan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan pengembangan pariwisata
2	Masyarakat Terlembaga	Kelompok Sadar Wisata Sido Rukun Pantai	Dukungan pelaksanaan pengembangan wisata, penyedia layanan informasi sejarah dan budaya, perantara komunikasi masyarakat dengan pemerintah

No	Aktor	Peran
	Ngobaran	
	Kelompok Religi Budaya Pura Segara Wukir	Produksi pengetahuan dan informasi sejarah religi budaya, narasumber sejarah, dukungan pelaksana pariwisata religi budaya

Aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran terdiri dari beberapa unsur yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pembangunan Umum Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa Kalurahan Kanigoro dalam hal ini kepala desa, dan masyarakat terlembaga yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Sido Rukun serta Kelompok Religi dan Budaya Pura Segara Wukir. Dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran belum melibatkan pihak swasta secara langsung. Disisi yang bersamaan aktor LSM, akademisi, dan media juga belum terlibat dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran maupun dalam produksi kebijakan.



Gambar 1 Pola relasi aktor jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi di Pantai Ngobaran

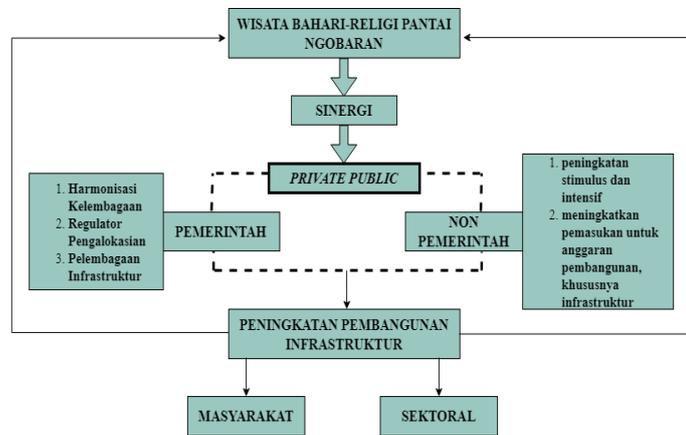
Pengelolaan relasi aktor menunjukkan pola relasi yang terbentuk bersifat horizontal dengan dinas pariwisata sebagai aktor utama. Melalui pola relasi serta matriks kepentingan dan pengaruh aktor, penulis melihat kecenderungan jenis jejaring kebijakan yang terbentuk dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran yaitu Bureaucratic Network, yakni jenis jejaring yang terbentuk dari koalisi advokasi. Jenis jejaring kebijakan ini yaitu hubungan antar aktor dalam kebijakan didominasi oleh petunjuk atau intruksi pemerintah, dengan pemerintah bertindak sebagai agensi [1].

Mempertahankan hubungan relasi dan komunikasi diperlukan wadah perantara [11]. Wadah perantara yang dimaksudkan dalam pengelolaan relasi yaitu berisi tentang delegasi dari masing-masing aktor yang terintegrasi serta saling memiliki. Relasi yang terbentuk dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran tidak dilengkapi dengan wadah perantara

sehingga komunikasi aktor belum terjalin dengan optimal. Pemetaan aktor dan pengelolaan relasi dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran masih kurang efektif sehingga diperlukan keterlibatan pihak swasta agar pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran lebih optimal.

3.2. Interdependensi dan Kerjasama Melalui Sinergitas Aktor

Sinergitas dibangun oleh para aktor dengan cara memaksimalkan perannya dalam masing-masing bidang yang sesuai [9]. Dengan adanya sinergitas yang dibangun maka secara keseluruhan dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengembangan. Sinergitas antara aktor jejaring kebijakan dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran yaitu dari aktor pemerintah dengan masyarakat berdasarkan fungsi masing-masing aktor.



Gambar 2 Pola sinergitas jejaring kebijakan

Adanya sinergitas antara aktor jejaring kebijakan akan meningkatkan *private public partnership*. Selanjutnya berdasarkan fungsi masing-masing aktor, pemerintah berfungsi sebagai harmonisasi kelembagaan yang ada, sebagai regulator untuk pengalokasian anggaran, serta pembangunan infrastruktur kepariwisataan. Sedangkan swasta berfungsi sebagai peningkatan intensif dan stimulus, dan pemasukan untuk anggaran pembangunan infrastruktur. Sinergitas aktor dalam jejaring pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran telah mampu menyediakan fasilitas dan akomodasi yang cukup memadai bagi wisatawan maupun umat Hindu yang akan beribadah meskipun dalam kondisi realitanya kualitas infrastruktur yang terdapat dikawasan Pantai Ngobaran masih kurang.

Koppenjan (2016) menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan interdependensi dan kerjasama dapat dilakukan melalui pengelolaan keunggulan komparatif dari masing-masing aktor, aktif memperjuangkan kepentingan bersama, serta mewujudkan iklim kerja yang kompetitif [6]. Dalam kajian pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran ini iklim kerja para aktor yang terlibat belum terlihat kompetitif, hal ini ditandai dengan kurangnya program pengembangan bagi kawasan Pantai Ngobaran dan adanya pekerjaan-pekerjaan yang berjalan kurang baik walaupun masing-masing aktor terlibat sudah berupaya untuk berperan aktif dalam proses pengembangan.

Terkait kesadaran aktor dalam memaksimalkan peran dan kinerjanya masih rendah terlihat seperti masih mengedepankan ego sektoral sehingga membuat komunikasi antar kelompok dalam jaringan kurang. Tingkat keaktifan anggota jejaring dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat menjadi tolak ukur terciptanya iklim kerja yang kompetitif, tetapi keaktifan anggota tersebut harus diikuti dengan kinerja yang baik. Bentuk ketergantungan atau interdependensi yang terdapat dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul terdapat dua jenis ketergantungan aktor dan tujuan dari masing-masing aktor, yakni interdependensi antar instansi pemerintah dan tujuan interaksi dan interdependensi aktor nonstate terhadap pemerintah dan tujuan interaksi.

Ketergantungan antar instansi pemerintah dapat diurai bahwa Dinas Pariwisata bergantung kepada pemerintah desa dalam integrasi peraturan desa dan pelebagaan jejaring pariwisata budaya dan religi desa. pemerintah desa bergantung pada sumber daya pengetahuan dan kompetensi Dinas Pariwisata. Ketergantungan aktor nonstate terhadap pemerintah dapat diurai bahwa dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata masyarakat bergantung pada pemerintah dalam alokasi anggaran, pembangunan fasilitas, pengelolaan potensi budaya dan religi berbasis pengetahuan dan legitimasi. Sedangkan pemerintah bergantung pada masyarakat sebagai subyek pelaksana dan partisipan aktif kepariwisataan sektor budaya dan religi.

3.3. Proses Interaksi Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya

Secara teori proses interaksi berkelanjutan dalam jejaring kebijakan dimaknai sebagai aktivitas lanjutan dari pelaksanaan koordinasi dan kerjasama aktor dalam suatu jaringan [4]. Proses interaksi berkelanjutan ditunjukkan dengan pengelolaan kepentingan bersama dan *controlling* atau saling mengawasi oleh seluruh aktor kepentingan yang terlibat. Dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai aktor utama dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata melakukan kontrol terhadap aktor lain yang terlibat. Kontrol dilakukan berdasarkan ukuran jalur dan pencapaian kepentingan pengembangan wisata.

Dalam konteks jaringan, aspek *controlling* atau pengawasan harus disertai dengan sistem intensif dan *punishment* dalam proses kerjasama. Dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi sudah terlihat keseimbangan pengawasan antar aktor, dalam arti seluruh aktor sudah secara sadar mengawasi satu sama lain. Sedangkan dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai ngobaran aktivitas *controlling* tidak ditemukan penerapan sistem intensif dan *punishment* terhadap kinerja anggota jejaring kebijakan.

Untuk dapat mencapai tujuan organisasi jaringan dan saling memenuhi kekurangan sumber daya perlu dilakukan mekanisme pertukaran sumber daya dan pengelolaan sumber daya [8]. Pengelolaan sumber daya bersama merupakan proses berkelanjutan dari terjadinya kerjasama, masing-masing aktor memanfaatkan dan menggunakan sumber dayanya. Dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul sumber daya yang harus dikelola dalam kerjasama terbagi menjadi dua, yakni sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Sumber daya berwujud dalam hal ini diartikan sebagai

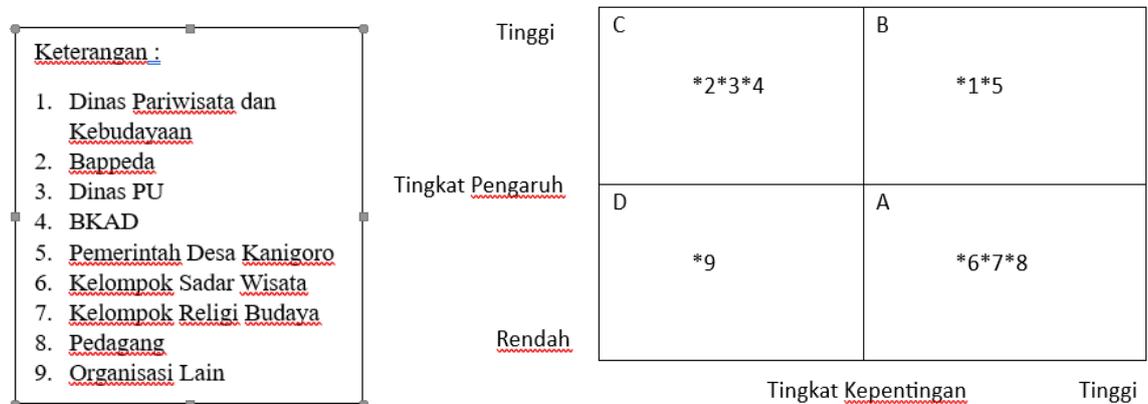
aset yang dimiliki masing-masing aktor, dapat dilihat dengan kasat mata seperti bangunan fisik, peralatan, pegawai, keuangan, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya tidak berwujud merupakan aset non fisik yang diciptakan atau yang sudah dimiliki oleh masing-masing aktor meliputi kewenangan, kekuasaan, pemikiran yang terkonsep, informasi, dan sebagainya.

Pengelolaan sumber daya dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran dilakukan dengan pengelolaan oleh masing-masing aktor dan pengelolaan sumber daya bersama melalui koordinasi bersama. Pengelolaan sumber daya dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran masih menghadapi kendala terkait cara mengkomunikasi kebutuhan sumber daya jejaring kebijakan kepada anggotanya ketika suatu sumber daya dimiliki dan terikat pada aktor lainnya.

3.4. Tercapai Kemanfaatan Bersama

Teori kemanfaatan bersama dalam konteks jejaring kebijakan pada pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran dimaknai sebagai upaya penyelarasan tujuan dan kepentingan melalui *collective action* [7]. Tindakan ini dimulai dengan menyatukan pemahaman, berbagi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aktor dalam jejaring, kemudian saling memahami bahwa tindakan yang dilakukan bersama atas dasar saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya [14]. Kepentingan dalam proses pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran secara umum dibagi menjadi dua yakni, kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor yang terlibat serta kepentingan dari kebijakan pengembangan itu sendiri.

Terkait kondisi tersebut, jejaring kebijakan dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran ditujukan untuk mencapai kepentingan bersama yaitu kepentingan pengembangan wisata berbasis religi. Secara faktual dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran sejauh ini hanya mengarah untuk kepentingan komersial dengan prioritas peningkatan jumlah kunjungan dan penerimaan retribusi sedangkan terkait kepentingan pelestarian budaya dan religi masih kurang diperhatikan.



Gambar 3 Matriks tingkat pengaruh dan kepentingan jejaring kebijakan

3.5.Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Wisata Bahari-Religi di Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul

1. Faktor pendukung

Faktor pendorong terjadinya kerjasama dan terbentuknya suatu jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi di Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul yaitu adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu aktor yang terlibat sehingga diperlukan upaya untuk saling melengkapi melalui pertukaran sumber daya dengan aktor lain. Kemudian adanya keterbatasan kewenangan aktor yang terlibat akibat pembagian tupoksi dan tugas sesuai regulasi mengharuskan adanya kerjasama agar para aktor yang terlibat dapat menjalankan kewenangan dan tugasnya sesuai spesialisasi dan bidang masing-masing. Dan yang terkahir adalah kebutuhan informasi masing-masing aktor. Kebutuhan informasi tersebut hanya bisa didapatkan melalui keterhubungan antar aktor dalam jejaring. Dalam proses ini para aktor dapat melakukan komunikasi secara timbal balik untuk bertukar informasi. Komunikasi dapat dilakukan melalui forum pertemuan langsung dengan aktor dalam jaringan atau secara tidak langsung melalui perantara.

2. Faktor penghambat

Disisi lain terdapat faktor yang menghambat jalannya jejaring kebijakan dalam pengembangan wisata bahari-religi di Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul yaitu, kurangnya SDM pengelola jaringan yang ditunjukkan dengan tidak adanya SDM yang khusus untuk mengelola komunikasi antar aktor sehingga aktor dalam jejaring kebijakan dapat terus berubah-ubah dan tidak tetap. Kemudian rendahnya kesadaran aktor dalam memaksimalkan peran dan kinerjanya dan masih mengedepankan ego sektoral sehingga membuat komunikasi antar kelompok dalam jaringan kurang, serta tidak terdapat wadah perantara komunikasi tetap. Media komunikasi yang berupa wadah perantara merupakan sarana dalam mempermudah penyampaian suatu informasi dalam komunikasi kepada anggota jejaring kebijakan. Media komunikasi biasanya dalam bentuk forum komunikasi tetapi belum bersifat tetap sehingga waktu dan anggota forum dapat berubah-ubah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kurang baiknya proses komunikasi dan keutuhan suatu informasi kebijakan yang kemudian berimplikasi pada beberapa kegiatan seperti lemahnya proses.

4. Kesimpulan

Keberhasilan maupun kegagalan kebijakan pengembangan wisata dipengaruhi oleh peran aktor sebagai pelaksana kebijakan. Jejaring kebijakan dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul diidentifikasi sebagai relasi para aktor yang saling ketergantungan dalam akses sumber daya dan melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Aktor dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul melibatkan 2 unsur yaitu pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Bappeda, BKAD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Desa Kanigoro. Sedangkan unsur masyarakat terlembaga yaitu Kelompok Sadar Wisata Sido Rukun Pantai Ngobaran

dan Kelompok Religi Budaya Pura Segara Wukir. Pola relasi yang terbentuk bersifat horizontal dengan dinas pariwisata sebagai aktor utama dan terbentuk jenis jejaring kebijakan Bureaucratic Network. Relasi yang terbentuk dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran tidak dilengkapi dengan wadah perantara sehingga komunikasi aktor belum terjalin dengan optimal. Terdapat sinergitas antara aktor yang terlibat yang dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan peran masing-masingnya untuk meningkatkan peningkatan jumlah wisatawan sebagai bentuk program pengembangan wisata.

Sinergitas terbentuk melalui adanya interaksi horizontal namun belum optimal sehingga perlu adanya penyesuaian kembali. jejaring kebijakan belum menciptakan iklim kerja yang kompetitif akibat minimnya kesadaran para aktor serta masih adanya ego sektoral aktor. Aktor yang terlibat saling mengawasi satu sama lain sebagai proses lanjutan dari interaksi. Sistem pengawasan dalam jejaring kebijakan sudah berjalan tetapi tidak menerapkan sistem insentif atau punishment. Para aktor dalam jejaring kebijakan melakukan pertukaran sumber daya untuk memenuhi keterbatasan masing-masing aktor. Dalam prosesnya masih terdapat kendala yaitu terkait cara mengkomunikasikan kebutuhan sumber daya jejaring kebijakan kepada anggotanya ketika suatu sumber daya dimiliki dan terikat pada aktor lainnya. Dilakukan pengelolaan kepentingan untuk menyelaraskan tujuan dan kepentingan untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran kabupaten gunungkidul jejaring kebijakan mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah dengan meningkatkan PAD sedangkan bagi masyarakat masih kurang karena program pengembangan yang masih minim. Faktor Pendorong dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran yaitu keterbatasan sumberdaya, keterbatasan kewenangan suatu aktor diluar bidang kemampuannya, serta didorong oleh kebutuhan informasi. Sedangkan faktor penghambat dalam jejaring kebijakan pengembangan wisata bahari-religi Pantai Ngobaran yaitu kurangnya SDM khusus pengelola komunikasi serta tidak terdapat wadah perantara komunikasi yang tetap. Selain itu rendahnya kesadaran aktor .

Referensi

- [1] Baker, T., & Walker, C., *Public Policy Circulation Arenas, Agents, and Action, The Lypiatts*, United Kingdom, 2019.
- [2] Craswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017.
- [3] Etzkowitz, H., & Zhou, *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship*, Routledge, New York, 2017.
- [4] Gedeona, Hendrikus T, Tinjauan Teoritis Pengelolaan Jaringan (Networking Management) dalam Studi Kebijakan Publik, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 10, Number 3, 2022, pp. 360-372.
- [5] Kemenparekraf, *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019*, Kemenparekraf, Jakarta, 2020.
- [6] Klijin, E.H. & Koppenjan, J., *Governance Networks in the Public Sector*, Routledge, New York, 2016.
- [7] Koliba, C.J., Meek, J.W., Zia, A., et.al., *Governance Networks in Public Administration and Public Policy*, Routledge, New York, 2022.
- [8] Marta, A. & Agustino, L., Analisis Policy Networks: Utilitas dan Limitasi, *Agregasi*, Volume 03, Number 01, 2019, pp. 25-41.

- [9] Molan, Kristianus Simon H., Cultural Tourism Policy Network in Lewokluok Village, East Flores Regency. *Jurnal PubBis*, Volume 02, Number 02, 2022, pp.127-138.
- [10] Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022
- [11] Rukmana, N. S., Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 02, Number 03, 2020, pp. 230-245.
- [12] Samiri, Muliani, *Analisis Jaringan dalam Implementasi Kebijakan Teori dan Praktek*, Mujahid Press, Makassar, 2019.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta Bandung, Bandung, 2017.
- [14] Suwitri, S, *Analisis Kebijakan Publik (2nd ed.)*, Universitas Terbuka Press, Tangerang, 2014.
- [15] World Economic Forum, *Travel & Tourism Development Index 2021 Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future*, World Economic Forum, Geneva, Switzerl